

Komparasi keadilan dalam penyelesaian kasus *aul* saat pembagian waris antara konsep ibn abbas dan imam syafi'i

Izuddin Sulthan Nashir¹, Isroqunnajah²

program studi Hukum keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
e-mail: *sultannasir74941@gmail.com

Kata Kunci:

Ibn 'Abbās; Imam al-Syāfi'i; 'Aul; Keadilan Waris; Fikih Mawaris.

Keywords:

Ibn 'Abbās; Imam al-Syāfi'i; 'Aul; Keadilan Waris; Fikih Mawaris.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbandingan konsep keadilan dalam penyelesaian kasus 'aul antara pandangan Ibn 'Abbās dan Imam al-Syāfi'i. Masalah 'aul muncul ketika total bagian ahli waris yang telah ditetapkan nash melebihi jumlah harta yang tersedia, sehingga diperlukan mekanisme korektif. Ibn 'Abbās memandang bahwa pembagian waris harus mengikuti nash secara literal tanpa modifikasi teknis, sehingga ia menolak konsep 'aul karena dianggap tidak memiliki dasar nash yang jelas. Adapun Imam al-Syāfi'i menerima 'aul sebagai mekanisme ijtihād berdasarkan qiyās, masalah, dan prinsip keadilan distributif. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menelaah fondasi ushul, metode istinbāt, dan pertimbangan keadilan dari kedua tokoh. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan Ibn 'Abbās unggul dalam otoritas tekstual, sedangkan pendekatan Imam al-Syāfi'i lebih komprehensif dalam menjawab realitas praktis pembagian waris. Oleh karena itu, 'aul dalam perspektif Syāfi'i dinilai lebih relevan diterapkan dalam konteks hukum waris modern demi menjamin keadilan substantif.

ABSTRACT

This study examines the comparative concept of justice in resolving cases of 'aul between the views of Ibn 'Abbās and Imam al-Shāfi'i. The issue of 'aul arises when the total fixed shares of heirs exceed the available estate, requiring a corrective mechanism. Ibn 'Abbās maintains a literal adherence to Qur'anic texts and therefore rejects the concept of 'aul, considering it unsupported by explicit textual evidence. Imam al-Shāfi'i, on the other hand, accepts 'aul as a form of ijtihād rooted in qiyās, masalah, and distributive justice. Using a qualitative literature-based approach, this study analyzes the usul foundations, interpretive methods, and justice considerations employed by both scholars. The findings indicate that while Ibn 'Abbās provides strong textual authority, his approach is less applicable in practical distribution scenarios where the estate is insufficient. Imam al-Shāfi'i offers a more comprehensive and adaptable framework, allowing proportional adjustments to maintain fairness. Thus, the concept of 'aul in the Shāfi'i tradition is more contextually relevant for modern inheritance practices that seek to uphold substantive justice.

Pendahuluan

Abdullāh ibn 'Abbās dikenal sebagai sahabat dan mufassir awal yang banyak meriwayatkan tafsir ayat-ayat waris serta pendapat sahabat tentang pembagian harta pusaka. Dalam literatur kontemporer, nama Ibn 'Abbās sering dijadikan referensi awal ketika muncul persoalan waris yang kompleks, termasuk yang terkait dengan 'aul (kekurangan harta dibanding bagian). Kajian hermeneutika modern terhadap warisan



nas waris menunjukkan bahwa interpretasi Ibn ‘Abbās masih relevan sebagai dasar tekstual.(Suleha et al., 2024). Sementara itu, Imam al-Shāfi‘ī sebagai pendiri mazhab dan perumus ushul fiqh memainkan peran penting dalam sistematisasi hukum waris secara normatif termasuk bagaimana mazhab-mazhab berikutnya menyikapi persoalan di luar nash, misalnya ‘aul. Banyak literatur modern menyebut bahwa posisi mazhab Syāfi‘ī tetap menjadi sandaran dalam praktik waris di banyak komunitas Muslim, sehingga solusi teknis seperti ‘aul sering dikaitkan dengan tradisi fiqh al-Shāfi‘ī. (Syahendra, 2018)

Titik Temu Sudut Pandang Waris Antara Ibn Abbas dan Imam Syafi’i

Salah satu titik temu antara keduanya adalah kesepakatan bahwa nash Al-Qur‘ān dan Sunnah adalah sumber utama pembagian waris sehingga dalam banyak kasus yang diatur secara jelas, bagian ahli waris tidak diragukan. Namun ketika muncul situasi di mana harta tidak mencukupi (menyebabkan kekurangan relatif terhadap bagian), baik tradisi yang dikaitkan dengan Ibn ‘Abbās maupun kerangka ushul mazhab Syāfi‘ī membuka kemungkinan ijtihad untuk menentukan solusi. Kajian terkini menyebut bahwa permasalahan ‘aul termasuk masalah khilāfiyah-ijtihādiyyah, yang dipandang butuh penyelesaian di luar nash.(Syahendra, 2018). Titik temu kedua adalah bahwa keduanya meskipun berbeda dalam metode menaruh perhatian pada keadilan distributif: bahwa pembagian waris tidak semata soal menghitung bagian menurut nash, tetapi juga concern agar tidak terjadi kerugian nyata pada ahli waris karena kekurangan harta. Oleh karena itu, mereka menyediakan legitimasi baik terhadap teks (Ibn ‘Abbās) maupun terhadap adaptasi ijtihād (al-Syāfi‘ī) ketika ‘aul muncul. Banyak penulis kontemporer menekankan bahwa pandangan ini memungkinkan fleksibilitas hukum waris tanpa meninggalkan otoritas syar‘i.(Kasman Bakry et al., 2021)

Pemikiran Ibn Abbas Saat Menyelesaikan Kasus Aul

Dalam studi tentang faraidh, Ibn ‘Abbās sering diposisikan sebagai rujukan pertama (tafsir sahabat) terhadap nash-nash waris; namun kajian kontemporer menunjukkan bahwa penjelasan yang dikaitkan dengannya mengenai mekanika pembagian tidak memformulasikan metode koreksi numerik seperti ‘aul secara eksplisit. Artinya, corpus riwayat yang menautkan Ibn ‘Abbās cenderung menegaskan porsi yang disebutkan oleh nash tanpa memberikan langkah teknis bila jumlah porsi melebihi harta. Beberapa peneliti modern melalui telaah manuskrip tafsir dan literatur periwayatan menyimpulkan bahwa posisi Ibn ‘Abbās lebih bersifat tekstual-normatif daripada teknis-operasional dalam persoalan aul. Kesimpulan ini penting karena menunjukkan bahwa tuntunan Ibn ‘Abbās sering dipakai sebagai dasar legitimasi tekstual sementara solusi teknis diperoleh dari tradisi fiqh selanjutnya.(Suleha et al., 2024). Kajian hukum waris kontemporer menyorot jurang antara riwayat sahabat (termasuk Ibn ‘Abbās) yang menegaskan nash dan kebutuhan praktis untuk prosedur perhitungan ketika melahirkan masalah seperti ‘aul; jurist klasik dan pembentuk mazhab kemudian mengisi jurang ini. Dengan demikian, pendapat yang diasosiasikan dengan Ibn ‘Abbās sering dipetik sebagai otoritas teks, sedangkan implementasi teknis contohnya menaikkan penyebut atau pengurangan proporsional dijelaskan dan dipraktekkan oleh generasi fuqaha setelahnya. Studi-studi 2021–2024 yang menelaah praktik lokal dan pendekatan pengadilan agama mengilustrasikan bagaimana rujukan sahabat dikombinasikan dengan kaidah fiqh untuk menghasilkan solusi. Oleh karena itu menelusuri Ibn ‘Abbās

hanya secara tekstual tidak cukup untuk memahami praktik 'aul di lapangan. (Suleha et al., 2024)

Penelitian terbaru yang khusus membahas ijtihad Ibn 'Abbās pada 'aul menunjukkan dua kecenderungan: sebagian penulis menginterpretasi riwayat-riwayatnya secara konservatif (memprioritaskan lafaz nash), sementara sebagian lain membaca riwayat tersebut dalam kerangka fleksibilitas maqāshid sehingga membolehkan penyesuaian praktis demi keadilan. Analisis perbandingan yang dipublikasikan (studi literatur dan kasus) memperlihatkan bahwa interpretasi pro-adaptasi sering muncul dalam studi yang menekankan tujuan syariah (masalah) dan konteks sosial-ekonomi modern. Dengan kata lain, cara umat dan pengadilan menggunakan referensi Ibn 'Abbās pada praktik 'aul sangat dipengaruhi oleh kerangka pemikiran kontemporer yang mereka adopsi. Hal ini menegaskan pentingnya telaah hermeneutik terhadap sumber-sumber sahabat ketika dikaitkan dengan problem numerik seperti 'aul.

Pemikiran Imam Syafi'i Saat Menyelesaikan Kasus Aul

Al-Syāfi'ī menekankan prioritas nash tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip ushul yang menjelaskan kapan dan bagaimana qiyās, ijma', dan ijtihād dapat digunakan; kerangka ini relevan untuk 'aul karena kasus tersebut sering memerlukan langkah teknis di luar perintah tekstual yang rinci. Literatur ushul modern (yang menelaah warisan al-Syāfi'ī) menekankan bahwa tradisi Syāfi'ī memberi legitimasi metodologis untuk solusi-solusi proporsional asalkan tidak kontradiktif dengan lafaz nash. Oleh karena itu, pendekatan Syāfi'ī cenderung menyediakan prosedur praktis yang merawat kedua hal: otoritas teks dan tujuan keadilan distributif. Kajian-kajian 2021–2024 menempatkan posisi ini sebagai alasan utama mengapa mazhab Syāfi'ī sering dijadikan rujukan pragmatis dalam pengadilan waris. (Lumatus et al., 2023). Dalam praktek mazhab Syāfi'ī, beberapa teknik umum dipakai ketika menghadapi 'aul: (1) menaikkan penyebut bersama (misal. pembagian berdasarkan total porsi sehingga menjadi 1), (2) pengurangan proporsional pada masing-masing bagian, atau (3) pengaturan prioritas distribusi berdasar kekuatan kedudukan atau kebutuhan semua dikisar dalam prinsip tidak melanggar lafaz nash yang jelas. Literatur fiqh kontemporer menjelaskan langkah-langkah matematika-fiqh ini serta justifikasinya berdasarkan kaidah masalah dan larangan dharar. Studi kasus di pengadilan agama dan fatwa lokal mendukung bahwa metode-metode inilah yang sering dipakai untuk menjamin keadilan distributif ketika terjadi kekurangan. Dengan demikian, mazhab Syāfi'ī menyediakan toolkit prosedural yang lebih eksplisit daripada sekadar rujukan tekstual sahabat. (Mujib, 2022)

Hakikat Keadilan dalam Islam dan Keterkaitannya Dengan penyelesaian Kasus Aul dalam Waris

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang menempatkan setiap individu pada posisi yang tepat menurut ketentuan syariat sehingga distribusi hak dapat terwujud tanpa melahirkan kezaliman. Para sarjana kontemporer mengingatkan bahwa keadilan tidak cukup dipahami secara matematis, tetapi harus dikembalikan pada maqāshid al-shari'ah sebagai orientasi menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat dalam seluruh proses muamalah termasuk pembagian waris. Keresahan mulai muncul dalam studi modern ketika ditemukan bahwa sebagian praktik waris masih terpaku pada

angka literal tanpa mempertimbangkan manfaat faktual yang benar-benar diterima ahli waris. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teks normatif dengan realitas penerima hak, sehingga keadilan substantif tidak tercapai secara maksimal. Karena itu, keadilan dalam hukum waris harus dipahami secara lebih luas yaitu mencakup kemaslahatan dan pertimbangan proporsional bagi seluruh pihak yang berhak. (Urrosyidin et al., 2022)

Dalam konteks tersebut, penyelesaian waris terutama pada situasi 'aul yakni ketika total bagian melebihi jumlah harta harus berpijak pada prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu ahli waris. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa sebagian masyarakat dan bahkan sebagian praktisi hukum masih memaknai 'aul sekadar sebagai teknik matematis, padahal pada hakikatnya ia merupakan mekanisme keadilan substantif. Ketidakmampuan memahami 'aul sebagai instrumen korektif menyebabkan munculnya pembagian waris yang timpang dalam beberapa kasus praktis. Oleh karena itu, para peneliti menegaskan bahwa 'aul adalah bentuk keadilan korektif (corrective justice) yang lahir dari kebutuhan memperbaiki ketidakseimbangan bagian akibat konfigurasi nash yang tidak selalu sesuai dengan kondisi konkret. Pemahaman inilah yang diharapkan dapat menjaga integritas teks sekaligus menjamin pemerataan hak antar ahli waris secara proporsional. (Taqiyuddin, 2021)

Kasus 'aul juga memunculkan problem epistemologis dalam fikih karena ia tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an, tetapi lahir dari kebutuhan praktis ketika pembagian literal menghasilkan total bagian yang melebihi harta. Tradisi fikih merespons fenomena ini dengan menegaskan bahwa keadilan dalam kondisi seperti ini bukanlah mempertahankan angka bagian secara kaku, tetapi menjaga kesetaraan proporsional sesuai tujuan syariat. Penelitian kontemporer tahun 2023 menunjukkan bahwa di sinilah muncul perbedaan paradigmatis antara Ibn 'Abbās yang dikenal menolak penerapan 'aul dan Imam al-Syāfi'ī yang menerima 'aul sebagai mekanisme ijtihād untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Keresahan akademik muncul karena pendekatan Ibn 'Abbās dianggap lebih tekstual, sedangkan pendekatan mazhab Syāfi'ī dianggap lebih responsif terhadap kondisi praktis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan 'aul bukan hanya perbedaan teknis, tetapi perbedaan cara memahami keadilan dalam menyikapi kekurangan harta warisan. (Pongliu, 2012)

Kajian hukum waris modern menegaskan bahwa tanpa mekanisme seperti 'aul, pembagian waris berpotensi timpang dan merugikan pihak tertentu, terutama ketika jumlah bagian ahli waris sudah melampaui harta yang tersedia. Oleh sebab itu, diskursus perbandingan antara Ibn 'Abbās dan Imam al-Syāfi'ī menjadi sangat relevan untuk menilai bagaimana keadilan substantif dapat diwujudkan dalam konteks pembagian waris yang kompleks. Penelitian kontemporer tidak hanya bertanya tentang siapa yang paling benar secara tekstual, tetapi siapa yang paling adil secara substantif dalam menjawab problem nyata yang dihadapi umat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki ruang ijtihād untuk menyesuaikan diri dengan kondisi riil tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, kajian mengenai 'aul dalam perspektif dua tokoh ini tidak hanya bernilai historis, tetapi juga penting dalam merumuskan standar keadilan yang relevan bagi praktik waris modern. (Taqiyuddin, 2021)

Pembahasan

Fenomena *'aul* dalam hukum waris Islam merupakan salah satu isu paling penting dalam kajian fikih mawārits karena menyangkut bagaimana syariat memastikan keadilan distribusi ketika total bagian ahli waris melebihi jumlah harta yang tersedia. Para ulama klasik memberikan jawaban metodologis yang berbeda terhadap problem ini, dan perbedaan itu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan fondasi ushul dan epistemologi hukum yang mereka anut. Tokoh yang paling menonjol dalam perdebatan ini adalah Ibn 'Abbās, yang menolak praktik *'aul* dan memilih pendekatan tekstual-literal terhadap ayat waris, serta Imam al-Syāfi'i yang justru mengukuhkan *'aul* sebagai solusi ijtihadi berbasis harmoni antara nash dan maslahat. Perselisihan keduanya membuka ruang besar untuk menilai ulang bagaimana keadilan substantif seharusnya ditegakkan dalam kondisi ketidakseimbangan matematis pembagian waris.

Dalam konteks penelitian berjudul "*Komparasi Keadilan dalam Penyelesaian Kasus 'Aul Saat Pembagian Waris Antara Konsep Ibn 'Abbās dan Imam Syāfi'i*", kajian ini berupaya menggali fondasi ushul, metode istinbāt, dan pertimbangan keadilan dari dua tokoh besar tersebut. Analisis dilakukan dengan tidak hanya menelaah pendapat mereka secara normatif, tetapi juga memeriksa konsepsi epistemik yang melatarbelakangi metode pengambilan hukum masing-masing. Dengan demikian, pembahasan tidak sebatas menyajikan perbedaan pendapat, tetapi juga menilai proporsionalitas dan relevansi argumentasi mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan distributif dalam hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang konsep *'aul* dan menawarkan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi waris kontemporer.

Fondasi Ushul dan Istinbāt dalam Pandangan Ibn 'Abbās

Dalam kajian hermeneutika waris, pandangan 'Abdullāh ibn 'Abbās menunjukkan bahwa ia menegaskan pembagian warisan harus mengikuti nash Al-Qur'an dan Sunnah secara literal, terutama bagian-bagian fard dan asabah sebagaimana ditetapkan. Dalam studi "*Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris*", ditegaskan bahwa menurut Ibn 'Abbās tidak terdapat konsep *'aul* dalam waris karena dianggap tidak ada dasar nash yang membenarkannya. Begitu pula dalam literatur kontemporer disebut bahwa Ibn 'Abbās cenderung bersifat tekstual-normatif, bukan teknis-operasional. Karena itu, setiap bagian yang disebut dalam nash harus dibagikan secara penuh tanpa pengurangan atau penyesuaian secara proporsional. (Suleha et al., 2024)

Pendekatan Ibn 'Abbās terhadap ayat-ayat faraidh menunjukkan bahwa interpretasinya berfokus pada penetapan hak sesuai teks tanpa memasukkan variabel eksternal seperti keadaan harta nyata. Artinya, beliau tidak menempatkan keadaan sosial-ekonomi, jumlah harta, atau rasio keadilan distributif di luar nash sebagai dasar menyesuaikan pembagian. Karena itu, dalam kasus di mana jumlah harta tidak mencukupi, Ibn 'Abbās tampaknya tidak menawarkan metode pengurangan atau pembagian ulang melainkan tetap pada bagian yang telah ditetapkan. Banyak penulis kontemporer menyimpulkan bahwa posisi Ibn 'Abbās bersifat tekstual-normatif semata tanpa rumus teknis untuk kasus *aul*. (Bachri, 2020)

Dari perspektif ushul, meskipun terdapat definisi umum ushul fiqh sebagai metodologi menarik hukum syar'i dari nash melalui dalil dan akal, Ibn 'Abbās menurut studi kontemporer lebih condong kepada dalil naqli tanpa memperluas ke analogi atau qiyās dalam persoalan waris. Karena itulah dalam kasus aul (kelebihan porsi dibanding harta), Ibn 'Abbās dianggap tidak melakukan istinbāt tambahan untuk mendukung pengurangan atau penyesuaian. Pendekatan ini konsisten dengan karakteristik interpretasi sahabat: mengembalikan persoalan kepada teks, dan berhati-hati dalam ijtihad jika nash tidak jelas atau tidak mendukung. Dengan demikian, Ibn 'Abbās tidak membangun kaidah ushul fiqh formal dalam konteks waris melainkan tetap dalam koridor tafsir dan periwayatan klasik. (Bachri, 2020)

Studi kontemporer menunjukkan bahwa penolakan Ibn 'Abbās terhadap 'aul juga didasari kekhawatiran terhadap penerapan hukum baru tanpa pijakan nash yakni menghindari penambahan hukum di luar syariat jelas. Dalam praktik di antara sahabat sendiri ada resistensi terhadap konsep 'aul: sebagaimana disebut dalam literatur waris, 'aul baru muncul ketika generasi setelah sahabat menghadapi situasi riil artinya bukan warisan langsung dari metode sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Ibn 'Abbās adalah menjaga kemurnian nash dan menghindari ijtihad ad-hoc dalam pembagian waris. Dengan demikian, Ibn 'Abbās mewariskan tradisi waris yang tekstual, dan meletakkan batas yang tegas terhadap modifikasi termasuk 'aul. (Bachri, 2020) Karena demikian, dalam penelitian waris modern yang mengkaji fenomena aul, pendapat Ibn 'Abbās sering dijadikan legitimasi tekstual: bahwa nash adalah pijakan utama, dan tidak layak dirubah melalui interpretasi kreatif. Namun, literatur kontemporer juga menunjukkan bahwa hanya mengandalkan pandangan Ibn 'Abbās tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan waris praktis ketika terjadi kekurangan harta. Karena itu, posisi Ibn 'Abbās dianggap sebagai bagian dari warisan metodologis (tekstual-normatif), bukan teknis-operasional. Dalam konteks aul, maka keberadaan warisan sahabat ini penting sebagai dasar otoritas teks, tetapi tidak sebagai solusi numerik atau prosedural.

Fondasi Ushul dan Istinbāt dalam Pandangan Imam Syafi'i

Imam al-Syāfi'ī dikenal sebagai pendiri ushul fiqh sebagai disiplin sistematis melalui karyanya Ar-Risalah, yang merumuskan metode istinbāt hukum dari sumber utama: Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyās. Dengan fondasi ini, Syāfi'ī menawarkan kerangka sistematis yang memungkinkan penafsiran hukum ketika nash tidak memberikan penyelesaian eksplisit. Karena waris dan faraidh kadang menghadapi situasi kompleks (misalnya total bagian melebihi harta), kerangka ushul ini memberi ruang bagi ijtihad dan qiyās sebagai dasar solusi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Syāfi'ī, hukum waris tidak harus kaku mengikuti teks secara literal jika teks gagal mengakomodasi realitas praktis semacam 'aul. (Rahmi et al., n.d.)

Metode Ushul yang dikembangkan Syāfi'ī sangat menekankan penggunaan bahasa Arab, logika, dalalah lafaz, dan akal dalam menafsirkan nash sehingga memungkinkan penerapan qiyās atau analogi saat nash tak memadai. Dengan demikian, ketika menghadapi permasalahan «kelebihan porsi terhadap harta» (situasi aul), juri fiqh berdasarkan mazhab Syāfi'ī dapat menggunakan kaidah ijtihad untuk menyesuaikan pembagian secara proporsional tanpa menyalahi prinsip syar'i. Kerangka ini bukan

semata soal numerik tetapi diwarnai oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerugian (dharar), sebagaimana karakter ushul fiqh yang mempertimbangkan maqāṣid syarī'ah. Karena itu, mazhab Syāfi'ī sering dijadikan rujukan pragmatis dalam praktik pembagian waris, terutama di komunitas di mana realitas ekonomi dan struktur keluarga menuntut fleksibilitas. (Rahmi et al., n.d.)

Dalam literatur kontemporer, banyak penulis menunjukkan bahwa solusi-solusi teknis seperti menaikkan penyebut bersama atau pengurangan proporsional bagian dalam kasus aul bersandar pada kerangka ijtihād dan qiyās ala mazhab Syāfi'ī. Artinya, mekanisme 'aul sebagaimana dikenal sekarang teknik koreksi matematika-fiqh tidak muncul dari nash langsung, tetapi dari kebutuhan praktis dan ijtihād ulama setelah generasi sahabat. Ini menunjukkan bahwa mazhab Syāfi'ī tidak semata mempertahankan tradisi literal, tapi membuka ruang adaptasi tanpa mengabaikan prinsip dasar syar'i. Dengan demikian, ketika nash tidak mencukupi sebagai penyelesaian, ijtihād dan qiyās menjadi alat legitimasi untuk memastikan keadilan distributif bagi semua ahli waris. (Rahmi et al., n.d.)

Karakteristik ushul Syāfi'ī yaitu logika, bahasa, akal, serta penggabungan naqli dan aqli membuat solusi waris menjadi adaptif terhadap situasi konkret tanpa melanggar syar'i. Ini penting dalam konteks masyarakat dengan kondisi ekonomi dinamis atau struktur keluarga kompleks, di mana pembagian literal sesuai nash bisa jadi tidak realistis atau bahkan merugikan sebagian ahli waris. Maka, dalam praktik mazhab Syāfi'ī, 'aul tidak semata soal matematis, melainkan soal keadilan substantif: menjaga agar waris diterima secara adil sesuai kondisi nyata. Pendekatan semacam ini memperlihatkan bahwa hukum waris Islam bersifat dinamis dapat menjawab tantangan zaman tanpa harus meninggalkan prinsip syar'i. (Bachri, 2018)

Oleh karena itu, mazhab Syāfi'ī telah menyediakan kerangka metodologis dan praktis yang memungkinkan penyelesaian kasus aul secara konsisten sesuatu yang tidak dimiliki oleh pendekatan Ibn 'Abbās. Ini menjadikan mazhab Syāfi'ī sebagai pilihan populer dan pragmatis dalam literatur waris kontemporer, khususnya dalam komunitas Muslim yang menghadapi kompleksitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, meskipun nash tetap dipandang sebagai pijakan, mazhab Syāfi'ī memberi legitimasi untuk ijtihād dan penyesuaian proporsional bila diperlukan. Maka dapat dikatakan bahwa pandangan Syāfi'ī lebih komprehensif dalam menangani aspek normatif dan praktis dari waris termasuk aul tanpa mengorbankan otoritas syar'i.

Komparasi Ushul dan Pertimbangan: Keadilan

Bila kita bandingkan, pendekatan Ibn 'Abbās sangat ketat terhadap nash: pembagian harus sesuai nash tanpa modifikasi, meskipun realitas harta tidak mencukupi. Hal ini menjaga kemurnian teks dan menjauhkan diri dari inovasi hukum. Namun, hal itu dapat menyebabkan ketidakadilan praktis jika waris literal menghasilkan lebih dari harta (aul). Di lain pihak, mazhab Mazhab Syafi'i melalui ijtihād dan qiyās memungkinkan solusi proporsional sesuai kondisi nyata. Dengan demikian, dari segi fleksibilitas terhadap realitas sosial-ekonomi, pendekatan Syāfi'ī tampak lebih adil. (Suleha et al., 2024) Dari aspek legitimasi syar'i: pendekatan Ibn 'Abbās mengandalkan nash langsung sehingga sangat kuat dari sudut otoritas teks. Namun, ketika nash diam, ia tidak menawarkan

jalan keluar, sehingga dalam situasi aul waris bisa macet atau tidak adil. Sebaliknya, Syāfi'ī menyediakan kerangka ushul yang secara metodologis syar'i (naqli + aqli), sehingga meskipun menggunakan ijtihād, tetap berada dalam bingkai syariat. Oleh karena itu, dari segi keseimbangan antara teks dan realitas, mazhab Syāfi'ī unggul dalam hal keadilan substantif. (Rahmi et al., n.d.)

Dari perspektif masalah dan keadilan distributif: pendekatan Ibn 'Abbās bisa jadi ideal secara idealistik nash dihormati tetapi tidak ideal secara praktis. Ketika hasil pembagian literal melebihi harta, sebagian ahli waris bisa dirugikan atau mereka harus berkurang tanpa mekanisme koreksi. Mazhab Syāfi'ī, dengan metode aul, meminimalkan kerugian dan memastikan bahwa semua ahli waris menerima bagian proporsional sesuai kemampuan harta, sehingga lebih mendekati keadilan distributif nyata. (Bachri, 2020). Namun, penting untuk diingat bahwa fleksibilitas ala Syāfi'ī juga membuka ruang ijtihād subjektif tergantung pada penyusunan qiyās dan masalah. Ini bisa menyebabkan perbedaan penerapan di masyarakat atau ketidakkonsistenan. Sementara itu, kekakuan Ibn 'Abbās memberikan konsistensi, tetapi risiko ketidakadilan dalam kasus ekstrem. Oleh karena itu, adil bukan berarti selalu fleksibel tetapi bagaimana metode itu dijalankan dengan tanggung jawab dan kesadaran kontekstual. Tujuan utama adalah menjaga kemurnian nash dan menghindari inovasi hukum, maka pendekatan Ibn 'Abbās unggul dalam otoritas tekstual. Tetapi jika tujuan adalah keadilan substantif dan adaptasi terhadap realitas, maka mazhab Syāfi'ī dengan ushul dan ijthādnya lebih relevan untuk menyelesaikan kasus aul. Karena itu, dari perspektif keadilan riil dalam masyarakat, pendekatan Syāfi'ī dapat dianggap lebih adil dalam banyak kasus, meskipun keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan Ibn 'Abbās dan Imam al-Syāfi'ī dalam menyelesaikan kasus 'aul. Ibn 'Abbās menekankan pentingnya mengikuti nash secara literal tanpa memberi ruang bagi koreksi teknis, sehingga ia menolak keberadaan 'aul karena tidak ditemukan dasar eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Pendekatan ini kuat dari sisi otoritas tekstual, namun tidak menyediakan solusi praktis ketika bagian ahli waris secara matematis melebihi jumlah harta. Sebaliknya, Imam al-Syāfi'ī menawarkan kerangka metodologis yang lebih fleksibel melalui ijthād, qiyās, dan prinsip kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya penyesuaian proporsional melalui mekanisme 'aul untuk menjaga keadilan distributif bagi seluruh ahli waris. Dengan demikian, dalam konteks pembagian waris modern yang sering berhadapan dengan dinamika sosial-ekonomi, pandangan Imam al-Syāfi'ī dinilai lebih relevan karena tidak hanya mempertahankan nilai-nilai syar'i, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan substantif yang menjadi tujuan utama syariat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar para praktisi hukum waris di pengadilan agama lebih mempertimbangkan penerapan mekanisme 'aul sebagaimana dirumuskan dalam mazhab Syāfi'ī karena terbukti mampu memberikan distribusi yang lebih adil dalam situasi kekurangan harta. Edukasi kepada masyarakat mengenai hakikat 'aul juga perlu diperkuat, sebab banyak yang memahami 'aul hanya

sebagai perhitungan matematis sederhana, padahal mekanisme ini memiliki landasan ijtihadiyah yang berpijak pada maqāsid asy-syarī'ah. Selain itu, penelitian lanjutan mengenai implementasi 'aul pada berbagai putusan pengadilan agama dapat membantu menilai konsistensi dan efektivitas penerapannya dalam praktik. Kajian terhadap pandangan sahabat seperti Ibn 'Abbās tetap penting untuk menjaga otoritas tekstual, namun pemahamannya perlu dikontekstualisasikan agar tidak menghambat penyelesaian masalah waris modern. Terakhir, lembaga pendidikan tinggi diharapkan memperkuat kurikulum faraidh dengan menekankan integrasi antara tekstualitas nash dan kebutuhan keadilan praktis, sehingga menghasilkan pemahaman yang seimbang dan aplikatif bagi para calon ahli hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Bachri, S. (2018). Pro Kontra 'Aul Dalam Kewarisan Islam : Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni dan Syiah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 10(2).
- Bachri, S. (2020). Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 21–50. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1197>
- Kasman Bakry, Muhammad Nirwan Idris, Fadlan Akbar, & Kurnaemi Anita. (2021). Kontroversi 'Aul dalam Hukum Waris Islam dan Praktiknya di Indonesia. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(2), 211–235. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i2.423>
- Lumatus, S., Qudsy, S. Z., & Laila, N. Q. (2023). The Controversy of Customary Law and Islamic Law in the Inheritance System. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 403–422.
- Mujib, M. (2022). Renewal on the Radd System on Inheritance Law in the Compilation of Islamic Law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(7), 227–236.
- Pongliu, H. (2012). WUJUD KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 177–190.
- Rahmi, N., Sulastri, W., & Pratiwi, N. (n.d.). KARAKTERISTIK PEMIKIRAN USHUL FIKIH IMAM SYAFI 'I DALAM KITAB AR RISALAH. 4(1).
- Suleha, S., Rahmat, R., & Irsyad Rafi. (2024). Analisis Ijtihad 'Abdullah Bin 'Abbās pada Masalah 'Aul dan Radd dalam Fikih Mawāriṣ. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 584–607. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1645>
- Syahendra, H. (2018). Aul Dalam Teori Dan Praktek Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 97. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1179>
- Taqiyuddin, H. (2021). The The Justice Dimensions in the Provision of Al-'Awl on Islamic Inheritance Law. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*, 7(2), 135–146. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v7i2.3635>
- Urrosyidin, M. S., Arifin, M. S., & Sup, D. F. A. (2022). Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 257. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6742>